



MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PEMBIAYAAN KELOMPOK SECARA SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN

Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.

Pendahuluan

Perempuan adalah bagian terpenting dalam konteks peran, partisipasi dan akses dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Laki-laki maupun perempuan secara aktif mesti terlibat dalam proses pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama yaitu akses dalam berusaha dan menjadi tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (status), peran, kemampuan, kemandirian, ketahanan mental, serta spiritual perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ajaran Islam memberikan justifikasi yang kuat terkait peran dan kedudukan perempuan. Pada masa awal Islam patut dicatat beberapa nama *shahabiyat* yang telah terlibat cukup intens dan memiliki pengaruh yang besar dalam lapangan ekonomi. Khadijah binti Khuwaylid, beliau seorang pengusaha besar dan sukses memimpin banyak karyawan laki-laki yang

membawa barang-barangnya untuk diekspor ke wilayah lain seperti Syiria, Sam dan lain-lain. Mekah saat itu adalah kota yang sangat strategis dan menjadi pusat perdagangan Internasional. Nabi Muhammad sebelum menjadi suami beliau telah terpilih sebagai orang yang sangat dipercaya untuk bermitra dengannya melalui sistem bagi hasil.¹² Selain itu disebut juga dalam musnad Ahmad beberapa nama perempuan yang aktif bekerja antara lain: pada bidang pertanian di Madinah, ada Asma' dari kelompok Anshar, Shifa' bin Abdullah berkiprah dalam hal seni kaligrafi, Aisyah dan Umm Salamah yang sangat baik hafalannya dan pemahamannya dalam periwayatan hadits dan pengajaran al-Quran, Khawalah, Maleekah, Thaqa'iyah, dan Binti Fakhriyyah berbisnis parfum (*'Itar*), Saudah bekerja dalam bidang industri.¹³ Para perempuan pada masa Nabi telah berkiprah dan bekerja di berbagai bidang untuk memberikan kontribusi dalam membangun peradaban dan pertumbuhan negara.

Perempuan Indonesia yang berjumlah lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia tidak berlebihan kalau diakui sebagai kekuatan rakyat. Fakta historis menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Indonesia sejak zaman sebelum penjajahan hingga masa penjajahan Belanda dan Jepang merupakan kekayaan luar biasa. Perempuan melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan hidup demi memelihara kehidupan keluarga dan lingkungan hidupnya mulai dari cara yang paling tradisional, yaitu pertukaran *in natura*, pertukaran pasar tradisional sampai pengalaman pahit harus menanggung hutang luar negeri. Sampai saat ini Indonesia beruntung memiliki perempuan-perempuan yang berada pada garda

¹²Mahmood Ahmad Ghadanfar, *Great Women of Islam: Who were Given the Good News of Paradise*, (Riyadh: Darussalam Publisher, 2001), h.23

¹³ibid. 15-16

terdepan dalam perekonomian. Sejumlah perempuan yang menjadi pilar dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Sejalan dengan semangat di atas, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi telah meningkat saat ini, setidaknya hal ini ditandai oleh dua proses. *Pertama*, peningkatan dalam “jumlah perempuan” yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah tangga. *Kedua*, peningkatan dalam “jumlah bidang pekerjaan” yang dapat dimasuki oleh perempuan. Kedua bentuk peningkatan tersebut menandakan perkembangan kuantitatif yang penting dalam kehidupan perempuan. Hal ini bukan hanya karena menunjukkan kesempatan-kesempatan yang semakin terbuka bagi perempuan tetapi juga penting bagi analisis tentang makna perkembangan tersebut baik bagi perempuan, laki-laki, maupun masyarakat secara umum.

Masalahnya kemudian adalah situasi dan kondisi saat ini di Indonesia telah menempatkan sejumlah perempuan kelas atas yang sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi tetapi pada kelompok bawah dan akar rumput perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dan berada dalam kemiskinan sehingga tidak memiliki akses, peran, kontrol dan manfaat yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi. Sementara itu kelompok pada level bawah ini merupakan jumlah terbesar dari penduduk negeri ini jika tidak dilibatkan tentu sangat merugikan dan menjadi beban ketergantungan. Untuk itu diperlukan berbagai model pendekatan pembangunan yang sensitif gender dan upaya penguatan peran perempuan sehingga potensi mereka mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi perempuan dengan model pembiayaan berbasis kelompok replika Grameen Bank pola syariah untuk tujuan

kesejahteraan perempuan. Model ini dipandang efektif dan paling tepat untuk memberikan permodalan bagi kelompok usaha mikro yang dikelola perempuan karena tanpa jaminan, kelompok perempuan itu sendiri dan dengan pola tanggung renteng menjadi jaminannya. Model ini dipercaya mampu memberdayakan perempuan sehingga memperkuat ekonomi keluarga. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi para akademisi, praktisi, komunitas terkait model pemberdayaan ekonomi perempuan, juga dapat menjadi benchmarking bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan untuk penguatan ekonomi perempuan khususnya kelompok usaha mikro yang dikelola perempuan Indonesia.

Pengertian Pemberdayaan

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran, partisipasi, dan akses semua lapisan masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Hal ini berarti menempatkan masyarakat berada pada posisi utama dan strategis sehingga demokratisasi ekonomi sebagaimana yang diamanahkan undang-undang ini dapat terwujud. Upaya untuk memberikan hak akses dan partisipasi kepada seluruh elemen masyarakat baik secara individu maupun komunitas sering dikaitkan dengan konsep pemberdayaan. Secara etimologis, kata pemberdayaan adalah terjemahan dari "*empowerment*" (bahasa Inggris). Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan,

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Istilah pemberdayaan diartikan juga sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat, memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih, menentukan dirinya dan mempunyai kesempatan dan akses untuk mendapatkan berbagai pilihan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa¹⁴ :

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.

Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996)¹⁵ mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan.” Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif

¹⁴ Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.

¹⁵ Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.¹⁶ Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995).¹⁸ Konsep ini lebih luas dari

¹⁶ Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity. Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA

¹⁷ Gunawan Sumodiningrat (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia

¹⁸ Chambers, R. (1985). *Rural Development: Putting The Last First*. London; New York: Longman.

hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Pemberdayaan juga mengandung makna adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Menurut Rappaport (1985), praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang-orang lain yang kita anggap penting, serta masyarakat di sekitar kita. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu cara sedemikian rupa sehingga rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses sedemikian rupa sehingga orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi, pengontrolan atas, dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).

Beberapa definisi pemberdayaan di atas menegaskan bahwa pemberdayaan adalah *proses* dan *tujuan*. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan Ekonomi

Elaborasi dari pemikiran tersebut secara keseluruhan akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan sehingga akan membawa dampak yang sangat luas baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.¹⁹ *Kecenderungan primer* merupakan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 1984). *Kecenderungan sekunder* menekankan pada proses penstimulasian, dorongan atau pemotivasian agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog sesungguhnya di antara kedua proses tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada hakikatnya suatu proses yang dinamis. Pemberdayaan ekonomi bukan hanya sekedar kegiatan atau program pemberian hal-hal

¹⁹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, Cet. Kedua), h. 43.

yang bersifat ekonomis kepada masyarakat, namun ia adalah gerak (aktivitas) yang menggerakkan; suatu proses penyadaran dan menemukan akan potensi masyarakat itu sendiri sehingga potensi yang ada menjadi aktual dan pada akhirnya memberikan nilai tambah kepada masyarakat itu sendiri secara terus-menerus (*continue*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses untuk mengubah sumber daya masyarakat itu sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan semakin relevan untuk direformulasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Saat ini dunia sangat berubah dengan memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dimana peran teknologi informasi telah banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Era saat ini sering dihadapkan pada situasi dan kondisi yang disebut VUCA yaitu *volatility* (perubahan), *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (rumit permasalahan yang muncul), *ambiguity* (ketidakjelasan). Istilah pemberdayaan itu sendiri merupakan upaya untuk membangun daya dengan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.

Maka, pemberdayaan ekonomi tidak hanya terkait permodalan. Bermula dengan menemukan potensi yang ada pada diri dan lingkungan, permodalan lebih sebagai faktor penguat. Pemberdayaan berasumsi bahwa proses pemberdayaan harus diawali dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berubah, selanjutnya pengelolaan potensi atau sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan dampak pada pengembangan sosial, ekonomi dan kultural. Dengan kata lain, akhir dari proses pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat dalam mengelola dan mengem-

bangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memberi manfaat serta nilai tambah, baik bagi diri maupun lingkungannya.

Berkembangnya semangat dan kesadaran pemberdayaan masyarakat sekarang ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pergeseran paradigma pembangunan yang terjadi pada berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pergeseran paradigma tersebut sejalan dengan munculnya dampak-dampak pembangunan yang ternyata tidak membawa kepada kemakmuran masyarakat secara umum; sebaliknya, pembangunan masa lalu yang sentralistik hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bersamaan dengan itu, potensi dan sumber daya di masyarakat juga banyak yang terbuang dan tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, terjadi paradoks; Indonesia yang merupakan wilayah subur dan kaya akan sumber daya alam namun, masyarakat di sekitarnya justru banyak yang miskin. Menyadari fenomena itulah, tumbuh semangat untuk melakukan pemberdayaan yang terus meluas, khususnya di Indonesia, yang diiringi dengan pergeseran paradigma pembangunan. Departemen Sosial RI menyebutkan, perbedaan paradigma pembangunan masa lalu dan masa kini antara lain:²⁰ Paradigma baru pembangunan menempatkan rakyat (baca: masyarakat miskin) bukan sebagai obyek yang bersifat pasif atau obyek penderita yang harus menerima apa yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah atau lembaga luar. Sebaliknya, mereka adalah subyek yang memiliki hak untuk menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang sesuai dengan kondisi mereka dan lingkungannya. Berkaitan dengan ini Korten Carner (1993) menyatakan: “konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif, kreativitas dari

²⁰Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin* (Departemen Sosial RI, 2005), h. 34-36.

rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan”.²¹

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.²² Definisi di atas banyak dipakai oleh kalangan penyelenggara pemerintah. Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.²³ Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).

²¹Erik Syehabudin, “Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan”, Artikel diakses pada 29 Oktober 2008 dari <http://www.radarbanten.com>

²² Mardi Yatmo Hutomo. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi.” Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta.

²³ *ibid*

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian Islam memberikan motivasi pada pemeluknya untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena Islam pada hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material itu, lantas mencari materi menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan umatnya untuk berkecukupan secara material. Nabi SAW sendiri juga menegaskan bahwa: *“alyad al’ulya khairun min al yad as sufla”*, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, atau memberi lebih baik daripada meminta”. Al-Quran juga yang menjelaskan untuk bekerja keras dan mengajarkan pentingnya umat Islam untuk bekerja dan memikirkan ekonominya. Di antaranya QS. al-Qashash [28]: 77: *“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat; dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari [kenikmatan] duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”*.

Dalam tafsir al-Jalalayn, ayat tersebut ditafsirkan; “Perolehlah [untuk] kepentingan akhirat [harta kekayaan] yang

telah Allah berikan kepadamu, dengan cara menginfakkan [sebagian] harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu yang berkaitan dengan keduniaan untuk menjadi amal akhirat” Juga dalam QS. Al Jumu‘ah [62]: 10: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah karunia Allah (yakni rizqi/harta) dan ingatlah kepada Allah banyak banyak agar kamu beruntung*”. Islam mendorong orang untuk bekerja. Hadits yang berbunyi: “*Asyaddu an nas ‘adzabun yauma alqiyamah al maghfiy al bathil* (siksaan paling berat pada hari kiamat, adalah bagi orang yang hanya mau dicukupi orang lain dan hidup menganggur)”.

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam tidak menginginkan umatnya berada dalam kemiskinan. Karena akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial bisa menyebabkan munculnya penyimpangan akidah. Pendapat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “*Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran*” (HR. Abu Na‘im dari Anas). Kemiskinan juga bisa menyebabkan orang tergelincir dalam akhlak dan moralitas yang tercela. Karena suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama. Manusia sebagai subyek ekonomi, yang dalam kelompok besar disebut umat, oleh Islam dibebani (*mukallaf*) untuk berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Taklif (pembebanan) ini berimplikasi pada banyak hal. Dalam disiplin fiqih meskipun ekonomi sendiri bukan merupakan komponen fiqih ikhtiar dalam arti luas disinggung karena erat kaitannya dengan usaha ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Masalah kemiskinan memang bisa dialami dan dihadapi oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik individu maupun keluarga, dan lain-lain. Akan tetapi di tengah masyarakat yang sebagian masih berlaku budaya patriarkal, adalah penting untuk mencermati fenomena kemiskinan yang ada pada kaum perempuan. Mengapa demikian? Karena dalam budaya patriarkal, masalah gender masih menjadi persoalan besar. Dalam hal ini, posisi perempuan umumnya berada pada pihak yang lemah; sementara lelaki mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin struktural yang berlangsung dalam hubungan ordinat (laki-laki) dan subordinat (perempuan). Oleh karena itulah, ketika membahas kemiskinan di tengah kondisi budaya tersebut, perempuan adalah pihak yang paling rentan dalam menerima dampak atas kondisi yang berkembang, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.

Bahwa kemiskinan perempuan seperti halnya kemiskinan umumnya dapat disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks. Namun secara umum, ia dapat ditelaah dalam dua perspektif:

- a. *Perspektif Ekonomi*; secara jelas kemiskinan dan pemiskinan perempuan ini terlihat dalam sektor ekonomi. Seorang perempuan yang ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dari laki-laki dari kategori yang sama. Perempuan yang tidak berpenghasilan, jauh lebih buruk situasinya dibandingkan perempuan yang berpenghasilan dalam keluarga dengan tingkat ekonomi subsisten.²⁴ Ketika perempuan ikut mencari penghasilan

²⁴Imam Cahyono, "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (*Poverty has a Women Face*)", *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 11.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian penghasilannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan lebih meningkatkan kebutuhan dasar keluarganya dibanding laki-laki.²⁵

- b. *Perspektif Politik*; dalam perspektif ini, perempuan tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin dan tidak punya kekuasaan. Bentuk kemiskinan perempuan dalam perspektif ini antara lain berupa kerentanan hidup (*vulnerability*), ketiadaan kesempatan dan suara (*voicelessness and powerlessness*), serta didukung pemerintah yang sangat bias gender (*male-biased governance system*). Bentuk kemiskinan gender berupa bias gender mudah ditemui dalam kebijakan struktural, perbedaan efek kebijakan dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum perempuan. Jadi, diskriminasi terhadap perempuan sangat kental.²⁶

Muhammad Yunus dalam bukunya “Bank Kaum Miskin” menyatakan bahwa kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin. Kemiskinan diciptakan oleh struktur masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat. Pengalaman *Grameen* menunjukkan bahwa sekecil apapun dukungan modal keuangan yang diberikan, kaum miskin sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan mereka.²⁷ Oleh karena itu, menurut Marguiret Robinson, pinjaman dalam bentuk *micro kredit* merupakan salah satu upaya ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi

²⁵Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (*Poverty has a Women Face*)”, *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 12.

²⁶Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (*Poverty has a Women Face*)”, *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 13.

²⁷Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), h. 198.

di antara mereka, yang mencakup: *Pertama*, masyarakat sangat miskin (*the extreme poor*), yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. *Kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*). *Ketiga*, masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*), yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut. Kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi, atau penciptaan lapangan kerja sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha menengah maupun besar.²⁸ Salah satu bentuk kelembagaan keuangan yang tepat untuk melayani kelompok usaha perempuan yang berada dalam kategori miskin namun masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk produktif adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga ini dapat memenuhi kebutuhan mereka karena prosesnya yang mudah dengan jaminan minimal dan sistem jempot bola secara langsung kepada mitra perempuan.²⁹ Tujuan Lembaga Keuangan Mikro antara lain : Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama

²⁸Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2009), h. 53.

²⁹Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers.2009), h. 68-69

masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.³⁰ Prinsip Umum Lembaga Keuangan Mikro adalah: Modal LKM harus bersumber dari anggotanya sendiri, yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu LKM dapat membuka berbagai jenis tabungan. Layanan kredit/ pinjaman/ pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM saja, tidak boleh kepada bukan anggota. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/ karakter pinjaman sendiri.

Perempuan menghadapi berbagai persoalan mendasar akibat gendernya, kontruksi sosial yang melekat pada peran, tanggung jawab dan perilakunya sebagai perempuan dan juga karena relasinya yang tidak setara dengan laki-laki sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.³¹ Menurut Hafidz seperti yang dikutip oleh Ratih Dewayanti dan Erna Ermawati Chotim dalam *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di pedesaan Jawa*, pemberdayaan dikenal sebagai satu pendekatan untuk memperbesar akses dan kontrol kelompok-kelompok marginal atas sumber daya ekonomi, politik dan budaya.³² Sedangkan Menurut Euis Amalia dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* menyebutkan bahwa “*Reaching and Empowering Women*” yaitu perempuan merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013, “*Lembaga Keuangan Mikro Bab.3*”

³¹Edriana noerdin, Dkk, *Potret Kemiskinan Perempuan* (Jakarta: Women Research Institute. 2006), h. 26

³² Ratih Dewayanti dan Erna Ermawati chotim, *Marjnalisasi dan Eksploitasi Perempuan usaha Mikro di Pedesaan Jawa*(Bandung: Yayasan AKATIGA, 2004), h. 22

perempuan merupakan peminjam, pemakai, dan pengembali kredit yang baik.³³

Melihat pentingnya peran perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungannya dan dengan berbagai kondisi yang dialaminya, maka pemberdayaan perempuan menduduki posisi yang sangat strategis. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya ekonomi, politik (pengambilan keputusan) dan budaya (perumusan nilai, simbol dan ideologi). Pemberdayaan perempuan pengusaha mikro terkait tidak hanya dengan persoalan mempertahankan kelangsungan usaha demi pemenuhan kebutuhan keluarganya dan dengan persoalan gender tetapi juga terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan.³⁴ Dilihat lebih jauh lagi, pemberdayaan perempuan mempunyai tingkatan (level) yang terdiri dari lima tingkatan yaitu:³⁵ Tingkat pertama kesejahteraan; Tingkat kedua akses; Tingkat ketiga konsistensi/kesadaran moral; Tingkat ke empat partisipasi; Tingkat kelima control.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Pembiayaan Berbasis Kelompok Replika Grameen bank

Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin

³³Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers.2009), h. 73

³⁴Ratih Dewayanti dan Erna Ermaawati, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*(Bandung: Yayasan AKATIGA.2004) h. 22-2

³⁵ Zarida,dkk, *Pemberdayaan Terhadap Wanita Pedagang Kecil di Pasar TradisionalBandung* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.2000), h.7-8

memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Bank ini terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel (bersama dengan Muhammad Yunus) pada tahun 2006. Menurut Muhammad Yunus kemiskinan adalah penyangkalan seluruh hak asasi manusia. Dimana kemiskinan adalah absennya seluruh hak asasi manusia. Frustrasi, permusuhan, dan kemarahan yang disebabkan oleh kemiskinan akut tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun. Untuk membangun perdamaian yang stabil kita harus mencari cara-cara menyediakan peluang bagi rakyat untuk bisa hidup secara layak.³⁶

Muhammad Yunus, pendiri bank ini, mendapatkan gelar doktor dalam ekonomi dari Universitas Vanderbilt. Dia terinspirasi pada bencana kelaparan Bangladesh untuk membuat pinjaman kecil kepada sebuah kelompok keluarga agar mereka dapat membuat barang kecil untuk dijual. Yunus percaya dengan memberikan pinjaman kecil tersebut kepada masyarakat luas dapat menghilangkan kemiskinan yang parah di pedesaan di Bangladesh.

Karakteristik *Grameen Bank* sebagai berikut:

- a. *Grameen Bank* memberikan kredit kecil tanpa agunan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi maupun yang berkaitan dengan perumahan.
- b. Sasaran nasabah *Grameen Bank* adalah masyarakat miskin dengan pemberian pinjaman tanpa agunan, sebagian besar dari masyarakat miskin tersebut adalah perempuan.
- c. *Grameen Bank* hanya mengenal tiga jenis kredit, yaitu kredit untuk kegiatan produktif, kredit untuk

³⁶Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin. Penerjemah Ifan Nasution* (Jakarta: Marjin Kiri, 2008), h. 263

- membangun rumah, dan kredit musiman untuk menanam tanaman musiman.
- d. Pembentukan kelompok, satu kelompok terdiri dari lima orang peminjam sehingga terjadi tanggung renteng.
 - e. Imbal jasa yang wajar yaitu 20% per tahun.
 - f. *Grameen Bank* tidak melakukan ekspansi besar-besaran, meskipun memiliki cabang di mana-mana, akan tetapi *Grameen Bank* tetap menjaga plafon kredit bagi setiap peminjam.³⁷

Pola perkreditan *Grameen Bank* tidak sama dengan prinsip-prinsip Bank Komersial. Transaksi dibuat sesederhana mungkin. Penetapan imbal jasa atas pinjaman sebesar 20% per tahun didasarkan pada pertimbangan keperluan operasional Bank. Untuk pemupukan modal diberlakukan ketentuan simpanan wajib kelompok sebesar 5% dari pinjaman anggota yang dipotong di muka. Di samping ada konsep simpanan untuk pembelian saham, *Grameen Bank* juga mewajibkan anggota untuk membayar simpanan asuransi sebesar 1% dari pinjaman yang diterima. Dengan adanya simpanan ini anggota yang mengalami musibah atau meninggal dunia tidak perlu melunasi hutangnya lagi karena sudah ditanggulangi oleh dana asuransi tersebut. Simpanan jaminan ini tidak boleh diambil sebelum 3 tahun pertama.³⁸

Dalam proses perekrutan anggota, *Grameen Bank* mengutamakan orang yang termiskin di antara kelompok orang miskin, maka sistem pemberian pinjaman dimulai dengan memilih dua orang yang termiskin dari kelompok. Apabila

³⁷---, "Grameen Bank yang manusiawi dan Demokratis" *Wacana* No. 14(November-Desember 1998), h. 11-12. Dalam www.Elsppat.or.id/download/file/w14_a4.pdf diunduh pada 14 Januari 2013

³⁸ Executive Summary; *Grameen Bank* di Bangladesh (Lembaga keuangan formal yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan, usaha mikro dan usaha kecil di Bangladesh).

setelah 10 minggu, 2 orang pertama tersebut cicilannya lancar, maka 2 orang berikutnya akan mendapatkan pinjaman. Ketentuan ini menyebabkan semua anggota kelompok mengawasi dan bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman. Apabila setelah 10 minggu kemudian pengembaliannya lancar, satu orang terakhir, yaitu ketua kelompok baru mendapatkan pinjaman. Jika pembayaran pinjamannya berjalan lancar sampai dengan selesai maka, plafon pinjaman akan dinaikkan sebesar plafon pokok ditambah dengan jumlah simpanan dan cicilan saham (bertambah 10 s/d 4,30%). Semakin lancar pengembalian-nya akan semakin besar jumlah simpanan anggota dan semakin besar pula plafon pinjaman yang disediakan.³⁹

Filosofi *Grameen Bank*⁴⁰

Kegiatan yang dilakukan oleh *Grameen Bank* selama ini didasarkan pada filosofi sebagai berikut:

- a. Kaum miskin memiliki keahlian yang tidak digunakan atau hanya sedikit digunakan.
- b. Kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin, tetapi oleh kebijakan dan lembaga yang mengecualikan mereka dari kesempatan.
- c. Kegiatan amal bukanlah solusi masalah kemiskinan, justru akan menciptakan ketergantungan daripada kemandirian.

³⁹ Teuku Syarif, “Grameen Bank Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Punya Potensi untuk Diberdayakan”, Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.

⁴⁰M. Nurul Alam dan Mike Getubig, *Program Pendirian dan Pelaksanaan Program Kredit Mikro dengan Metode Grameen. Berdasarkan Praktek Grameen Bank dan Pengalaman Grameen Trust dan Para Mitra Grameen Foundation*, h. 9, 10.

- d. Menjadi wirausaha adalah cara tercepat dan termudah untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum miskin.
- e. Kaum perempuan memiliki kecenderungan tinggi untuk jatuh ke dalam kemiskinan dan yang paling menderita karenanya, tetapi mereka memiliki dampak langsung bagi keluarga mereka.

Sejalan dengan kondisi kemiskinan yang umumnya lebih banyak berdampak kepada kaum perempuan maka, pemberdayaan kepada kaum perempuan merupakan hal yang urgen; dan inilah yang menjadi dasar model pemberdayaan *Grameen Bank*. Program pendampingan yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan yang dilakukan *Grameen Bank* mengutamakan kelompok kaum perempuan (dalam keluarga) miskin sebagai “kelompok sasaran” (target grup). Hal ini didasarkan atas beberapa hal, antara lain:⁴¹

a. *Dari segi ketenagakerjaan*

Umumnya kaum perempuan dipandang bukan sebagai kaum produktif. Mereka lebih banyak diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Padahal jika disadari mereka sebenarnya dapat menjadi salah satu pilar ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dengan membuka akses kredit kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan usaha produktif di sela-sela kegiatan mengurus rumah tangga sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pada saat yang sama, kaum ibu juga perlu didampingi untuk terus mengatur keuangannya melalui manajemen tabungan.

⁴¹M. Amin Azis, Ibnu Supanta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma & BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), h. 12-13.

b. *Secara kultural*

Pentingnya pemberdayaan bagi kaum perempuan juga terkait dengan hubungan perempuan dengan keluarga. Secara kultural, kaum perempuan telah terbiasa mengurus rumah tangga, karena merekalah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap konsumsi keluarga. Oleh karena itulah, berbicara tentang pemberdayaan kaum miskin erat kaitannya dengan pemberdayaan kaum perempuan yang langsung membidik penyangga keluarga.

c. *Secara emosional*

Dalam praktek kehidupan, kaum perempuan (ibu) lebih dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu, perempuan menjadi kunci penentu terhadap pembentukan kualitas sumber daya anak-anak bangsa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan, baik dalam hal perbaikan nutrisi, kesehatan maupun pendidikan. Maka tidak berlebihan jika perempuan perlu diberdayakan, dengan demikian perbaikan kualitas anak-anaknya pun secara langsung dapat ditingkatkan.

d. Akses kredit untuk kaum perempuan merupakan jembatan emas menuju kesetaraan hak-hak (*perbaikan ketimpangan gender*).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka, menempatkan kaum perempuan sebagai prioritas program pemberdayaan merupakan hal yang strategis. Mereka adalah golongan masyarakat terkena dan paling merasakan dampak kemiskinan, terutama ketika terjadi kerawanan ekonomi dalam keluarga. Terlebih terdapat banyak kasus di berbagai tempat, kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga seringkali menjadi salah satu cara laki-laki melepaskan tanggung-jawab atas keluarganya dan menceraikan istrinya.

Dalam berbagai kasus perceraian, perempuan cenderung mengambil beban terbesar untuk membesarkan anak-anak, dengan atau tanpa sumbangan mantan suami.⁴² Dalam keadaan ini seorang ibu akan berjuang hingga detik terakhir untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan demi mempertahankan hidup anak-anaknya.

Muhammad Yunus dalam bukunya “Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan” mengatakan bahwa meminjamkan uang kepada perempuan bermanfaat lebih banyak kepada keluarga daripada kepada laki-laki. Bila uang dipinjamkan kepada laki-laki, mereka cenderung menggunakan untuk diri sendiri. Namun, bila dipinjamkan kepada perempuan, uang itu diinvestasikan untuk membuat usaha yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Dengan begitu, meminjamkan uang kepada perempuan akan menciptakan efek air terjun (*cascading effect*) yang bermanfaat bagi seluruh keluarga dan akhirnya kepada seluruh komunitas.⁴³

Uraian di atas menegaskan bahwa pemberdayaan kaum perempuan di bidang ekonomi mutlak dilakukan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan melaksanakan program yang menekankan pada 5 aspek, yaitu:⁴⁴

⁴²Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (Poverty has a Women Face)”, *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005): h. 13.

⁴³Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 60-61.

⁴⁴Rommy Haryanto, “Pemberdayaan Wanita untuk Perkembangan Ekonomi” diakses pada tanggal 2 Juni 2010 dari <http://www.wrp-diet.com/pemberdayaan-wanita-untuk-perkembangan-ekonomi/>

a. Pengembangan Kapasitas dan Karakter

Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk perempuan.

b. Konsultasi dan Pendampingan

Setelah pelatihan, kelompok perempuan kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya di masa depan.

c. Organisasi

Sebagai individu ataupun kelompok usaha, perempuan sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Pada tahap ini diharapkan para perempuan yang berwirausaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.

d. Pasar

Para perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki.

e. Jejaring

Diharapkan para perempuan dan kelompok usahanya mampu menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.

Selain 5 aspek penguatan tersebut diatas, suatu hal yang juga perlu dibangun agar pemberdayaan ekonomi perempuan

bisa berhasil, yaitu mental positif. Perlu dibangun terus-menerus mental positif perempuan sehingga mereka mau dan mampu berwirausaha, bahwa mereka bisa dan mampu memainkan peran-peran ekonomi, serta berkontribusi bagi keluarga dan pembangunan sekitarnya.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua tahap: *pertama*, pemberdayaan personal dengan memberikan informasi akan hak-hak, kesetaraan dan sebagainya, bertujuan untuk menanamkan nilai internal terhadap diri masing-masing individu. *Kedua*, pemberian daya kuasa berupa sistem nilai dan organisasi sehingga perempuan memiliki otoritas, kekuasaan dan peluang dalam mengelola organisasi atau kelompoknya.⁴⁵

Sebagai makhluk sosial, seseorang mustahil dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudaya jika hidup sendiri. Sejak lahir, seseorang disayangi, dididik dan dikembangkan dalam (kelompok) keluarga. Kemudian dilanjutkan dalam (kelompok) sekolah, (kelompok) pergaulan dan (kelompok) pekerjaan. Sepanjang hidupnya seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan atau organisasi.

Pengertian kelompok

Tidak semua kumpulan orang disebut kelompok. Sekumpulan orang dapat disebut kelompok, jika:⁴⁶

- 1) Saling kenal dan memiliki ikatan batin satu sama lain;

⁴⁵GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia), "Perempuan Sangat Rentan Terhadap Kemiskinan", diakses pada tanggal 2 Juni 2010 dari http://www.gapri.org/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=124

⁴⁶Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro, Program Pengembangan Kecamatan (Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro), *Kredit Mikro Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin*, (T.tp.,t.t.: 2002), h.15.

- 2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama;
- 3) Keanggotaannya relatif stabil untuk jangka waktu yang lama;
- 4) Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan anggota;
- 5) Ada struktur, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas di antara anggotanya;
- 6) Ada aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggota;
- 7) Ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk tujuan kelompok.
 - a. Manfaat kelompok bagi pemberdayaan ekonomi perempuan

Kelompok yang sudah ada maupun yang dibentuk baru dan memenuhi sebagian besar persyaratan sebagai kelompok, memberikan banyak manfaat dalam rangka perluasan pasar usaha maupun efisiensi pelayanan kepada peminjam kaum perempuan.

Adapun manfaat berkelompok bagi pemberdayaan ekonomi perempuan di antaranya:⁴⁷

- 1) Kelompok adalah wahana belajar bagi anggotanya;
- 2) Sebagai dasar untuk tindakan ke arah perubahan;
- 3) Sebagai dasar bagi organisasi yang besar;
- 4) Kelompok mengendalikan sikap dan perilaku anggotanya;
- 5) Kelompok mengefisienkan pekerjaan;
- 6) Kelompok mempromosikan dan membangun citra.

⁴⁷Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro, Program Pengembangan Kecamatan (Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro), *Kredit Mikro Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin*, (T.tp.,t.t.,: 2002), h. 16-17

Pola *Grameen Bank* ini mengutamakan kekuatan kelompok perempuan sebagai basis utamanya. Kekuatan kelompok ini juga merupakan jaminan atas kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha mikro perempuan. Meskipun permodalan bukan yang utama namun dengan adanya bantuan permodalan dengan skema yang tepat dan rekat dengan persoalan usaha perempuan maka mampu meningkatkan produktivitas usaha perempuan hingga gilirannya mampu meningkatkan pendapatannya dan semakin mampu menyejahterakan keluarga dan membantu proses pembangunan ekonomi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.⁴⁸

Saat ini pola replika *Grameen Bank* ini telah banyak dikembangkan di berbagai wilayah oleh berbagai lembaga keuangan baik secara konvensional maupun secara syariah. Kebutuhan pengembangan syariah ini sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan sejalan dengan kelembagaan bank maupun lembaga keuangan non bank yang beroperasi secara syariah. Diharapkan terdapat linkage program antara bank dan lembaga keuangan komersial dengan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan tidak semata-mata profit namun juga untuk kepentingan sosial.

Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Replika *Grameen Bank* dengan Pola Pembiayaan Syariah.

Secara umum prinsip pemberdayaan perempuan pola *Grameen Bank* ini sama yaitu menggunakan kelompok sebagai basis utamanya. Hanya saja pada saat pengguliran dana modal kerja yang diberikan digunakan akad transaksi secara syariah.

⁴⁸ Teuku Syarif, "Grameen Bank: Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Punya Potensi untuk Diberdayakan", Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.

Di sini akan dijelaskan beberapa akad yang digunakan pada replika *Grameen Bank* syariah yaitu :

a. *Akad wadiah*

Digunakan pada saat awal di mana mitra yang diberikan permodalan wajib menyimpan dananya dalam bentuk tabungan yang merupakan titipan sebagai jaminan komitmen atas pembiayaan yang diberikan. Tabungan sebesar 10% dari besarnya pembiayaan yang diberikan sebagai tabungan wadiah karena bersifat titipan, tidak akan diambil hingga pembiayaannya lunas hingga periode yang disepakati.

b. *Akad Mudharabah*

Digunakan untuk transaksi pembiayaan dari lembaga keuangan mikro kepada mitra secara bagi hasil. Akad yang digunakan adalah *mudharabah* yaitu kerjasama bagi hasil dengan ketentuan nisbah diawal rata-rata 20% untuk lembaga keuangan mikro sebagai *shahibul mal* (pemberi permodalan) dan *mudharib* (pelaku usaha) yang mendapat bagian sebesar 80%. Porsi bagi hasil ini dinamakan nisbah yang harus disepakati di awal akad. Pembagian dilakukan dari pendapatan atau revenue. Sebagai contoh seorang mitra membutuhkan modal kerja sebesar Rp. 1.000.000 untuk berjualan barang sembako sederhana, pendapatan yang diperoleh rata-rata adalah sebesar Rp. 500.000 maka porsi bagi hasil untuk lembaga keuangan mikro adalah sebesar Rp. 100.000 dan untuk mitra sebesar Rp. 400.000. Pokok dan bagi hasil dicicil dalam jangka waktu 50 minggu dan disetorkan setiap minggu pada saat kumpulan kelompok bertemu secara berkala setiap minggunya. Pembiayaan yang diberikan individu namun berada dalam tanggung jawab suatu kelompok dan para anggota kelompok tersebut bersepakat untuk saling menanggung satu sama lain. Pembentukan kelompok oleh para anggota dan